

## **BAHASA TUA DAN PENUTUR TUA; SEBUAH CERITA DARI MALUKU BARAT DAYA**

**Santi Dwiningsih, Bhakti Lisanti Agustini**

Universitas Gadjah Mada  
*dwiningsih santi@yahoo.com*

### ***Abstrak***

Dalam Sekapur Sirih Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia Edisi Keenam, disebutkan bahwa bahasa adalah penjaga budaya, jika bahasa punah, maka budaya masyarakatnya pun bisa turut punah, itu karena bahasa menyimpan tata nilai budaya dalam berbagai wujud, yakni; kosakata, pantun, cerita rakyat, sejarah masyarakat setempat, mitos, legenda, tradisi lisan, dan ungkapan-ungkapan yang sarat dengan nilai etika serta moral (<https://petabahasa.kemdikbud.go.id/sekapursirih.php>). Indonesia sangat kaya bahasa daerah yang sarat dengan nilai-nilai budaya. Sayangnya, bahasa daerah di Indonesia sudah berada dalam posisi yang mengkhawatirkan dan hal itulah yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). MBD memiliki beragam bahasa daerah dan tradisi lisan, salah satunya berupa bahasa tua atau disebut juga dengan *bahasa tanah*. Kini, bahasa tersebut terancam punah karena semakin jarang dituturkan kecuali dalam ritual adat, dan karena jumlah penutur *bahasa tanah* semakin sedikit dengan usia yang terbilang tua. Mereka para penutur *bahasa tanah* adalah kaum *marna* (bangsawan) yang hanya diperkenankan mewariskan pengetahuan *bahasa tanah* tersebut kepada keturunan mereka yang juga berdarah *marna*. Ironisnya, proses pewarisan tersebut mandek, akibatnya, *bahasa tanah* semakin tersingkir. Oleh karenanya, pewarisan *bahasa tanah* harus segera diupayakan kembali, karena jika *bahasa tanah* punah, maka tata nilai serta budaya yang dikandungnya pasti turut punah. Artikel ini ditulis untuk memberi wawasan mengenai *bahasa tanah* yang ada di Maluku Barat Daya dan untuk mencaritahu apa upaya terbaik untuk menyelamatkannya.

*Kata kunci: Maluku Barat Daya, bahasa, bahasa tanah, kepunahan, adat*

## ***THE OLD LANGUAGE, AND ITS OLD SPEAKERS; A STORY FROM SOUTHWEST MALUKU***

### ***Abstract***

*Language is a Culture Keeper. If a language extincts, so does its culture. This is due to the fact that a language stores cultural values in various forms, as vocabulary, rhyming poems, folklore, local community history, myths, legends, oral traditions, and expressions which are loaded with ethical as well as moral values. Indonesia has varieties of local languages that are full of cultural values. Unfortunately, local languages in Indonesia are seriously at risk of being endangered. This case also happens in Southwest Maluku or Maluku Barat Daya (MBD). MBD has many varieties of languages, both as written and oral traditions including N old language or also called Bahasa Tanah. Nowadays, Bahasa Tanah is endangered because it is rarely spoken except in ritual practices, even the number of speakers is getting less and less with a quite old age. The speakers of Bahasa Tanah are from marna (noble group) who are only allowed to pass on knowledge of Bahasa Tanah to their descendant who also have marna blood, yet the inheritance process has stagnated. As the result of this stagnated inheritance process, Bahasa Tanah increasingly eliminated from their daily life and knowledge. Therefore, the strive for inheritance process is needed immediately, because if Bahasa Tanah extincts, it will affect the value systems and the culture itself to extinction. This article was written to give an insight into Bahasa Tanah in Southwest Maluku and to find out what the best effort to counter it extinction.*

*Keyword: Southwest Maluku, language, bahasa tanah, extinction, adat.*

Naskah masuk: 23 - 02 - 2021 ; Revisi akhir: 06 - 06 - 2021 ; Disetujui terbit: 30 - 07 - 2021

## PENDAHULUAN

“Bagaimana jika suatu saat bahasa itu lenyap tertanam di dalam tanah bersama tubuh mereka? Apakah layak untuk disesali?”

Dua pertanyaan tersebut melintas begitu saja ketika penulis secara tiba-tiba menyadari, bahwa beberapa orang laki-laki tua bijaksana nan eksentrik, dengan usia lebih dari 70 tahun yang pernah penulis temui secara langsung sekitar setahun yang lalu di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, kemungkinan besar adalah generasi terakhir dari penutur suatu bahasa tua yang kini tersingkir dan terancam punah. Bahasa tersebut adalah *bahasa tanah*. Mereka, para penutur, adalah narasumber yang memegang peran penting dalam satu kegiatan penelitian yang pernah penulis lakukan pada bulan April hingga Mei tahun 2019, yang bertempat di tiga pulau, yakni Pulau Wetar, Pulau Damer, dan Pulau Lakor. Penelitian tersebut merupakan hasil kerjasama antara PT. Sinergi Visi Utama, yakni sebuah lembaga riset independen yang berbasis di Yogyakarta, dan Litbang Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penelitian itulah yang menginspirasi penulis untuk menuangkan cerita tentang *bahasa tanah* di dalam artikel ini.

Indonesia adalah negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia, setelah Papua Nugini yang memiliki 851 bahasa. Berdasarkan data dari Ethnologue Edisi 23 yang dirilis pada tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki 722 bahasa, 710 di antaranya merupakan bahasa yang masih eksis dan 12 di antaranya merupakan bahasa yang sudah punah. Dari jumlah bahasa yang masih eksis, 704 di antaranya merupakan bahasa daerah, dan 6 sisanya tidak tergolong sebagai bahasa daerah (<http://www.ethnologue.com>). Sumber yang lain, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa sampai dengan Oktober 2019, Indonesia tercatat memiliki 718 bahasa ([https://petabahasa.kemdikbud.go.id/infografisdir/783Leflet\\_Peta\\_Bahasa\\_2019.pdf](https://petabahasa.kemdikbud.go.id/infografisdir/783Leflet_Peta_Bahasa_2019.pdf)) Terlepas dari data yang berbeda tentang jumlah bahasa yang terhimpun, baik Ethnologue maupun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa bahasa-bahasa yang terancam punah di Indonesia didominasi oleh bahasa daerah atau bahasa ibu yang berada di wilayah timur Indonesia, terutama dari Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Di wilayah-wilayah tersebut tersebar ratusan bahasa daerah dengan jumlah penutur yang relatif sedikit, kondisi itu sangat bertolakbelakang dengan wilayah bagian barat Indonesia yang memiliki sedikit bahasa.

Collins (2019:105-106) menyebutkan jika hal tersebut tidak terlepas dari faktor migrasi dua manusia purba yang terjadi pada masa prasejarah, yaitu migrasi Austronesia dan Australo-Melanesia. Migrasi tersebut berpengaruh besar pada pembentukan budaya dan bahasa di Nusantara. Collins yakin jika bahasa pribumi yang ada di Nusantara diturunkan dari dua kelompok bahasa kuno yang masih terkait dengan kedua migrasi purba itu. Dua bahasa kuno itu yakni keluarga bahasa Austronesia dan keluarga bahasa Papua yang datang pada masa yang berbeda. Keluarga bahasa Austronesia diyakini masuk ke Nusantara sekitar 4.000 tahun yang lalu, sementara itu keluarga bahasa Papua dipercaya masuk ke Nusantara

sejak 40.000 tahun yang lalu. Pengaruh migrasi yang paling tampak adalah di wilayah Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Kedua wilayah ini merupakan zona transisi antara populasi Mongoloid dan populasi Melanesia. Itulah mengapa wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Provinsi Maluku, memiliki bahasa daerah yang sangat kaya dan beragam daerah namun dengan jumlah penutur yang sangat banyak.

Kantor Bahasa Maluku menyatakan bahwa Provinsi Maluku adalah wilayah yang paling banyak memiliki bahasa daerah yang terancam punah dan minim regulasi yang terkait dengan perlindungan bahasa. Lebih lanjut, kondisi itu diperparah dengan rendahnya sikap positif masyarakat terhadap bahasa daerah mereka sendiri karena alasan-alasan yang beragam. Adanya stereotip 'kampungan' yang melekat kepada penutur bahasa daerah, menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat enggan berbahasa daerah dan enggan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Kantor Bahasa Maluku meyakini rendahnya sikap positif masyarakat terhadap bahasa daerah dapat berimbas kepada semakin terbukanya jalan menuju kemusnahan bahasa (<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2019/12/menjayakan-bahasa-daerah/>). Grimes pun mengamini bahwa salah satu sebab utama dari kepunahan bahasa adalah terhentinya proses pembelajaran bahasa daerah di lingkup keluarga (<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2018/07/kepunahan-dan-revitalisasi-bahasa-daerah/>).

Berdasarkan pada data Ethnologue Edisi 23 Tahun 2020, Provinsi Maluku tercatat memiliki 95 bahasa daerah dengan status yang berbeda. Data ini berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Kantor Bahasa Maluku yang menyebut terdapat 60 bahasa daerah (<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2019/12/menjayakan-bahasa-daerah/>). Terdapat 10 bahasa yang dinyatakan telah punah atau *extinct* di Maluku. Sepuluh bahasa yang telah punah itu adalah; Hoti, Hukumina, Hulung, Serua, Te'un, Palumata, Loun, Moksela, Naka'ela, dan Nila, semuanya merupakan bahasa yang berasal dari wilayah Maluku Tengah. Sebanyak 85 bahasa lainnya berada dalam status di antara 5 (*developing*) dan 8b (*nearly extinct*). Dari 85 bahasa daerah yang masih bertahan di Maluku, 22 di antaranya merupakan bahasa daerah yang ada di wilayah MBD ([www.ethnologue.com](http://www.ethnologue.com)).

Kaya-rayanya bahasa daerah di Indonesia seolah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, hal itu dapat menjadi suatu kebanggaan dan modal yang besar untuk bangsa ini, khususnya dalam ranah budaya. Di sisi lain, kekayaan itu juga menimbulkan persoalan tersendiri karena bahasa daerah ternyata rawan mengalami kepunahan karena berbagai sebab, salah satunya karena mandeknya proses pewarisan bahasa. Kondisi itu diperparah dengan tidak kuatnya perlindungan pemerintah terhadap bahasa daerah yang ada di Nusantara, tak pelak, bahasa daerah semakin terdesak dan terpinggirkan. Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, penulis memahami bahwa teramat sulit bagi pemerintah untuk melakukan pendataan, melakukan kajian, hingga merancang serta melakukan upaya pelestarian serta revitalisasi dengan banyaknya bahasa daerah di Indonesia. Kendala biaya, sumber daya manusia, hingga luasnya wilayah Nusantara, kemungkinan hanyalah sebagian kecil dari berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Kendala lain yang mungkin relatif sulit untuk ditindaklanjuti

selama ini adalah; kendala budaya. Adanya kendala budaya dalam proses pelestarian bahasa daerah dapat dilihat pada kasus kemandekan pewarisan *bahasa tanah*.

*Bahasa tanah* adalah bahasa daerah tua yang sudah ada sejak sebelum Kristen masuk ke tanah Maluku. *Bahasa tanah* tidak hanya ditemukan di MBD, tetapi ditemukan juga di wilayah lain di Maluku, salah satunya di Maluku Tengah. Kajian tentang *bahasa tanah* di Maluku Tengah dilakukan oleh beberapa ahli bahasa, salah satunya oleh Latupapua dan Maspaitella (2015) yang secara gamblang memaparkan tentang adanya diglosia *bahasa tanah*. Diglosia adalah sebutan untuk menjelaskan suatu fenomena digunakannya lebih dari satu bahasa secara berdampingan namun untuk situasi dan atau tujuan yang berbeda. Latupapua dan Maspaitella memaparkan pandangan bahwa fenomena diglostik itulah yang memicu *bahasa tanah* di Maluku Tengah berada dalam posisi *potentially endangered languages*, selain karena dipicu juga oleh adanya tekanan yang besar dari bahasa mayoritas, yaitu bahasa Melayu Ambon. Situasi *bahasa tanah* di Maluku Tengah bisa jadi tidak sama dengan situasi *bahasa tanah* yang ada di MBD, namun satu hal yang pasti, *bahasa tanah* di MBD pun mengalami fenomena diglostik yang cenderung merugikan eksistensi bahasa itu sendiri. Kenyataan lain yang tidak bisa diabaikan adalah usia para penutur *bahasa tanah* yang sudah sangat tua dan ‘terbelenggu’ tradisi, sehingga mereka lebih memilih pasif dan tidak membagikan ilmunya, alih-alih mewariskan pengetahuan bahasa yang mereka kuasai.

Terancam punahnya bahasa daerah, termasuk *bahasa tanah*, adalah kenyataan yang harus dihadapi manakala hegemoni bahasa Melayu Ambon sangatlah kuat. Hal ini karena bahasa Melayu Ambon menjadi *lingua franca* yang berhasil menjembatani perbedaan bahasa di Maluku, termasuk di MBD. Kenyataan lainnya, pewarisan bahasa daerah dari generasi tua kepada generasi muda cenderung terhambat. Sudah jelas, bahasa daerah dalam kondisi terdesak dan kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menuturkan bahasa Melayu Ambon merupakan suatu hal yang baik, namun, memperjuangkan kelestarian bahasa daerah merupakan suatu kewajiban, karena bahasa daerah adalah warisan luar biasa yang memiliki tata nilai yang sangat luhur. Kehilangan bahasa daerah, berarti kehilangan keluhuran tersebut.

## PEMBAHASAN

### A. Studi tentang *Bahasa Tanah* di Maluku, Kedatangan Bangsa Eropa, dan Hegemoni Bahasa Melayu Ambon

Artikel ini dimulai dengan penyebutan dua istilah yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kerancuan, yaitu istilah bahasa daerah dan *bahasa tanah*, apakah keduanya memiliki arti yang berbeda? Merujuk kepada penjelasan Asrif (<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2019/02/bahasa-tanah/>) bahasa daerah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan *bahasa tanah* adalah ragam bahasa yang digunakan dalam peristiwa yang lebih khusus, terutama yang terkait dengan peristiwa adat. Lebih lanjut, Asrif menyebutkan bahwa pemilihan kata ‘tanah’ dalam *bahasa tanah* didasarkan pada keyakinan bahwa ‘tanah’ adalah asal dan pusat kehidupan. Secara runut, Asrif menjelaskan mengenai pengertian serta posisi *bahasa tanah* dalam kutipan berikut.

“*Bahasa tanah* merupakan satu kesatuan dengan bahasa daerah. *Bahasa tanah* merupakan ragam bahasa dalam suatu bahasa. Kosakata atau tuturan-tuturannya merupakan tuturan-tuturan khusus, sakral, dan kadangkala mengandung kekuatan magis. Karena kekhususan, kesakralan, dan kemagisannya itu, ragam bahasa ini disebut sebagai bahasa tersendiri yang berbeda dengan bahasa daerah di tempat itu. *Bahasa tanah* merupakan serangkaian kosakata dan kalimat-kalimat tertentu, yang telah turun-temurun digunakan oleh tokoh-tokoh adat. Kosakata *bahasa tanah* bukan merupakan kosakata umum yang digunakan dalam percakapan hari-hari. Kosakata *bahasa tanah* hanya digunakan oleh para tokoh adat dalam upacara-upacara adat.”

Frans (dalam Latupapua dan Maspaitella, 2015:6) mendefinisikan *bahasa tanah* sebagai bahasa budaya yang digunakan sebagai alat komunikasi yang secara khusus merujuk pada bahasa yang digunakan pada peristiwa adat tertentu. Luhulima (dalam Latupapua dan Maspaitella, 2015:6) memberi definisi yang relatif sempit, menurutnya, *bahasa tanah* adalah bahasa asli atau *oorspronkelijke taal* penduduk di Maluku Tengah. Tjia dan Bolton (dalam Latupapua, dan Maspaitella, 2015:6) membuat definisi bahwa *bahasa tanah* merupakan ungkapan dalam bahasa Melayu Ambon yang digunakan untuk menyebutkan atau memberi nama pada bahasa-bahasa asli daerah Maluku. Sejauh ini, definisi *bahasa tanah* yang dijelaskan oleh Asrif adalah definisi yang teraktual menurut penulis.

Dalam kacamata penulis, *bahasa tanah* adalah bahasa daerah yang seringkali disebut juga dengan sebutan bahasa tua, bahasa *tete nene moyang* (leluhur), bahasa ritual, yang posisi serta perannya kini hanya terbatas pada ranah adat dan ritual. *Bahasa tanah* adalah bahasa eksklusif karena hanya ditampilkan secara khusus dalam peristiwa serta ritual adat, dan peran utamanya adalah sebagai bahasa pengantar yang dituturkan oleh orang-orang terpilih, yaitu tokoh adat dari golongan *marna*. Secara umum, MBD mengenal stratifikasi sosial yang masih berlaku walaupun dinyatakan tidak seketat dulu. *Marna* adalah sebutan untuk golongan/kasta teratas yang diakui di beberapa wilayah, antara lain Wetar, Damer, dan Lakor. Menariknya, istilah untuk menyebut golongan yang berada di bawah *marna* tidaklah sama. Di Pulau Wetar susunan stratifikasi sosialnya adalah *marna*, *bur*, *stam* dan *atta*. Golongan terbawah, yakni *atta* adalah golongan yang dianggap setara dengan kaum budak. Di Pulau Lakor, susunan stratifikasi sosial yang berlaku adalah *marna*, *uhuru*, *poora* dan *akra*. Sama halnya dengan *atta* yang ada di Pulau Wetar, *akra* di Pulau Lakor adalah golongan terbawah yang derajatnya dianggap sama dengan budak. Kemudian di Pulau Damer, stratifikasi sosial yang berlaku adalah *marna*, *bur* dan *stam*. Golongan terbawah yaitu *stam*, adalah golongan yang derajatnya dianggap setara dengan budak. Stratifikasi sosial tersebut sudah tidak berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan hanya berlaku dalam konteks adat. Meskipun demikian, perkawinan dengan memandang latar belakang golongan kasta masih sering ditemukan demi memenuhi standar perkawinan ideal menurut masyarakat setempat.

Di MBD, *bahasa tanah* mengalami kemandekan dalam proses pewarisan baik secara vertikal maupun horizontal, dan hanya dituturkan di ranah yang sangat sempit, yaitu ranah

ritual atau adat. Bahasa ini semakin eksklusif ketika adat mengharuskan adanya proses pewarisan ‘setara’ dan ‘sedarah’, yang artinya pihak yang berhak mewarisi pengetahuan tentang *bahasa tanah* ini harus dari keturunan langsung dari si penutur yang juga berdarah *marna*. Tidak jarang, *bahasa tanah* juga diidentikkan dengan mantra-mantra dari masa lampau yang mengandung inti ajaran yang dianggap berseberangan dengan ajaran gereja. *Bahasa tanah* kerap dianggap mengandung ajaran *suanggi* (manusia yang mempelajari ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai dan merugikan orang lain), ajaran kafir, ajaran-ajaran yang ada ketika ‘dunia belum terang’, yaitu istilah untuk menggambarkan gelapnya dunia ketika agama Kristen belum masuk ke tanah Maluku. Terlepas dari kesan negatif yang melekat, *bahasa tanah* yang ada pada masa kini adalah bahasa eksklusif yang sengaja ‘disimpan’ dengan maksud untuk menjaga kemurnian tradisi, padahal jika merujuk kepada studi tentang *bahasa tanah* yang dilakukan oleh Latupapua dan Maspaitella (2015) di Maluku Tengah, *bahasa tanah* di masa bangsa Eropa belum datang ke Maluku adalah bahasa ibu yang digunakan sebagai guyub tutur oleh masyarakat pada umumnya. Ketika bangsa Eropa datang, perubahan terjadi.

Apabila ditarik kembali ke masa lalu yaitu sebelum bangsa Eropa datang, tepatnya pada sekitar abad ke 17, *bahasa tanah* di Maluku merupakan bahasa daerah yang jamak dituturkan oleh masyarakat pada situasi apapun. Semua perlahan berubah ketika bangsa Eropa datang ke Maluku dengan niat awal untuk berdagang, namun pada akhirnya justru melakukan penjajahan. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Inggris tentu meninggalkan ‘bekas’ di Maluku. Tidak hanya bekas berupa peninggalan fisik, tetapi juga pengaruhnya yang kuat pada tradisi serta sistem politik lokal setempat. Pada masa pendudukan Belanda, terjadi perubahan yang berarti pada digunakannya bahasa Melayu secara masif, bukan hanya di wilayah yang berbahasa ibu Melayu, tetapi juga wilayah lain yang sangat jauh dari budaya Melayu, termasuk di tanah Maluku. Hal ini tentu amat menarik karena pada saat itu bahasa Melayu sangat identik dengan Islam, sedangkan sebagian besar masyarakat Maluku memeluk agama Kristen. Bahasa Melayu yang tumbuh di Maluku bercampur dengan istilah-istilah bahasa asing seperti bahasa Belanda dan Portugis. Pada perkembangan selanjutnya, bahasa Melayu ragam ini disebut dengan bahasa Melayu Ambon. Pada masa itulah *bahasa tanah* perlahan-lahan tersingkir dan bahasa Melayu Ambon mulai menjadi bahasa utama di wilayah Maluku pada sekitar abad ke 18 (Collins dalam Latupapua, 2017:110).

Bahasa Melayu Ambon yang dituturkan oleh orang Maluku pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu pasar yang tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya kolonialisme. Bangsa Eropa menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Maluku dan suku bangsa lainnya untuk berbagai kepentingan, baik dalam kehidupan sehari-hari, perniagaan, pendidikan, hingga kepentingan misi penyebaran agama Kristen. Bahasa tersebut berkembang di Kepulauan Maluku dan bercampur dengan unsur-unsur bahasa daerah serta istilah asing yang merupakan pengaruh bahasa Belanda dan bahasa Portugis. Percampuran itulah yang membentuk bahasa Melayu Ambon dan membuat bahasa Melayu Ambon menjadi sangat khas (Latupapua, 2017:110).

Bahasa Melayu Ambon di Maluku semakin masif digunakan karena dua alasan. Pertama, bahasa Melayu sebagai *lingua franca* yang menjembatani jarak budaya di balik beragamnya bahasa daerah atau *bahasa tanah* di Maluku. Kedua, bahasa Melayu telah dijadikan bahasa pengantar dalam penyebaran agama Kristen oleh bangsa Eropa. Hal ini dikuatkan oleh Fransiscus Xaverius yang menggunakan bahasa Melayu yang dipelajarinya di Malaka sebagai bahasa utama untuk mengajarkan *catechismus*. Lambat laun bahasa Melayu semakin menggeser *bahasa tanah*, terutama di wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memeluk Kristiani. Di wilayah yang masyarakatnya memeluk Islam, *bahasa tanah* cenderung bertahan dengan lebih baik (Abdurachman, dalam Latupapua, 2017:111).

Jejak bahasa Melayu Ambon juga ditemukan di MBD. Jejak tersebut dapat ditelusuri pada dua manuskrip lawas yang ditulis dan dicetak kembali oleh Museum Nasional RI. Manuskrip pertama adalah manuskrip yang ditulis oleh Z.P Bakker Radja pada 15 Juni 1881. Manuskrip tersebut berjudul asli; ‘Tjeritera dari orang pedoedoek di poelau Wetter’, yang berisi hikayat atau dongeng tentang Pulau Wetar yang ditulis dengan tulisan latin berbahasa Melayu Ambon. Bakker sendiri adalah seorang raja Kisar (Munawar dalam Laporan Penelitian Jejak Antropologi, 2019). Manuskrip lawas kedua ditulis oleh J.G.F Riedel pada periode tahun 1835-1911 yang berjudul ‘Peraturan Adat Istiadat Daerah Wetter dan Luang di Maluku Dalam Naskah Kuno’ yang naskah aslinya juga ditulis dalam huruf latin dengan bahasa Melayu Ambon. Riedel merupakan seorang pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda yang pernah bertugas di Timor dan Ambon. Riedel menulis catatan mengenai kebiasaan, budaya, hingga bahasa yang digunakan di Wetar pada periode dia menulis buku tersebut (Noegraha dalam Laporan Penelitian Jejak Antropologi, 2019). Baik Bakker dan Riedel yang hidup pada sekitar abad ke-18 sama-sama menjadikan bahasa Melayu Ambon sebagai bahasa utama dalam catatan mereka, dan hal itu merupakan petunjuk penting betapa kalangan aristokrat dan pegawai pemerintahan pada zaman itu ternyata sudah cakap serta andal dalam menggunakan bahasa Melayu Ambon.

## **B. Bahasa Tanah di Maluku Barat Daya**

Tiga pulau di MBD yang pernah penulis kunjungi, yakni; Wetar, Damer, dan Lakor, adalah pulau yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi-tradisi yang terkait dengan jati diri mereka. Secara garis besar, masyarakat yang ada di tiga pulau didominasi oleh pemeluk Kristiani taat yang memegang teguh konsep wilayah petuanan, memiliki raja negeri yang dihormati, memiliki *saniri* (lembaga eksekutif adat), memiliki *soa* (kumpulan dari *matarumah* (marga) yang berada di bawah negeri. Pada umumnya, *soa* membawahi *matarumah* (nama lain dari fam, marga, atau nama keluarga) yang saling terkait atau masih memiliki hubungan kekerabatan, serta *matarumah* yang solid, dan mengenal adanya stratifikasi sosial yang masih berlaku, di mana golongan atau kasta teratas adalah golongan bangsawan yang disebut dengan *marna*. Dari berbagai istilah tersebut, istilah negeri mungkin membingungkan bagi orang yang tidak akrab dengan tatanan sosial di Maluku. Menurut Tiwery (dalam Laporan Penelitian Jejak Antropologi, 2019) istilah negeri

merujuk kepada persekutuan teritorial yang terdiri dari beberapa *soa* (minimal tiga *soa*). Di beberapa wilayah di Maluku, kepala negeri disebut juga dengan sebutan raja yang tergolong berkasta tinggi.

Kasta teratas, yakni golongan *marna*, memiliki berbagai akses yang tidak dimiliki oleh golongan lain di bawahnya, baik akses dalam ranah budaya, ranah sosial politik lokal, maupun akses dalam ranah pemerintahan. Dari pengalaman penulis pribadi, golongan *marna* selalu mendapatkan hak utama untuk berbicara dan bercerita tentang asal-muasal suku, hikayat, dongeng, dan siapa leluhur dari suku mereka. Dari tuturan mereka, penulis mendengar cerita tentang tersohnya wangi cengkih dan pala dari Maluku, cerita tentang perkasanya Gunung Wuarlali yang berada di Pulau Damer, cerita tentang indahnya Danau Tihu yang dihuni oleh buaya gaib dan *morea* (belut) raksasa di Pulau Wetar, dan cerita tentang megahnya bangunan *dewala* (peninggalan bersejarah yang tersusun dari batu-batu cadas yang dibangun untuk membentengi kampung dan rumah) yang berdiri kokoh di Pulau Lakor. Dari golongan *marna* jugalah lahir tokoh-tokoh adat yang dipercaya memiliki ilmu pengetahuan mumpuni yang diwarisi dari *tete nene moyang* mereka. Sebagian kecil dari tokoh-tokoh adat tersebut merupakan maestro *bahasa tanah* yang sudah berusia tua.

Dari sekian banyak narasumber yang penulis temui, hanya ada empat narasumber yang mengaku menguasai dan mampu menuturkan *bahasa tanah*. Mereka merupakan narasumber utama yang berstatus sebagai tokoh adat di negeri mereka masing-masing. Mereka adalah Siluanus Milianus Mawetars (71 tahun – Pulau Wetar), Icah Leksair (72 tahun – Pulau Lakor), Ruland Surlialy (77 tahun – Pulau Damer), dan Joksans Romer (77 tahun – Pulau Damer). Keempat narasumber tersebut bisa jadi hanyalah sebagian kecil dari penutur *bahasa tanah* yang masih bertahan di MBD, karena sampai saat ini belum ada data tentang berapa jumlah penutur *bahasa tanah*, berapa jumlah *bahasa tanah* yang masih bertahan, dan dari pulau, negeri, *saniri*, *soa* atau *matarumah* mana *bahasa tanah* itu berasal. *Bahasa tanah* adalah tradisi lisan yang tidak pernah didokumentasikan. Maluku tidak mengenal adanya budaya tulis, maka tidak heran jika tradisi lisan justru lebih menonjol jika dibandingkan dengan tradisi tulis.

MBD adalah wilayah yang sangat luas dan sangat heterogen, antara satu pulau dengan pulau yang lainnya memiliki corak serta warnanya masing-masing. MBD memiliki 48 pulau dan wilayahnya seluas 663.779,2 km<sup>2</sup> (90%) adalah lautan, dan 8.648 km<sup>2</sup> (10%) adalah daratan (Watloly dalam Wakim, 2018: 76). MBD dikenal sebagai kabupaten muda nun jauh di seberang karena termasuk ke dalam wilayah terluar di Indonesia. MBD berbatasan dengan Laut Banda di sebelah utara; di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Timor dan Selat Wetar, di sebelah Barat berbatasan dengan Kepulauan Alor, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Tanimbar. MBD terdiri dari 17 kecamatan yang terletak di tiga kepulauan utama, yaitu: Kepulauan Terselatan, yang terdiri dari Pulau-pulau Terselatan, Kisar Utara, Kepulauan Romang, Wetar, Wetar Barat, Wetar Utara, dan Wetar Timur. Kepulauan Lemola, yang terdiri dari Letti, Moa Lakor dan Lakor. Kemudian, Kepulauan Babar yang terdiri dari Pulau-pulau Babar, Babar Timur, Pulau Masela, Daweloor Dawera, Damer, dan Mdon Hyera



(Maluku Barat Daya Dalam Angka, 2018:3). Dari pembagian pulau-pulau tersebut, dapat dilihat bahwa penulis telah mengunjungi tiga kepulauan utama di MBD ketika mengunjungi Pulau Wetar, Damer, dan Lakor.

Sebagian besar dari masyarakat MBD yang tersebar di 17 kecamatan dan tiga kepulauan utama memiliki bahasa suku yang berbeda, sehingga *bahasa tanah* yang ada di sana pun sangat beragam. Jadi, sangat dimungkinkan dalam satu kecamatan di wilayah MBD memiliki banyak bahasa suku yang berbeda. Oleh karena itulah mereka menggunakan bahasa Melayu Ambon sebagai *lingua franca*. Sebagai gambaran tentang kondisi bahasa di MBD, penulis menyusun 22 bahasa daerah berdasarkan pada data Ethnologue edisi 23 tahun 2020, yang terangkum dalam tabel dengan keterangan tambahan berupa status bahasa dan jumlah penutur dari masing-masing bahasa. Data ini tidak menggambarkan kondisi aktual *bahasa tanah* yang ada di MBD, karena Ethnologue sendiri tidak menyebutkan bahwa bahasa daerah yang mereka cantumkan datanya merupakan bahasa yang digunakan secara khusus pada ranah ritual sebagai ciri umum dari *bahasa tanah*. Namun, data ini bisa digunakan sebagai bahan refleksi betapa mengkhawatirkannya situasi bahasa daerah di MBD pada kurun waktu empat dekade terakhir. Lihat kolom Jumlah Penutur, di bagian tersebut tertulis bahwa data terlama diambil pada tahun 1980.

Penulis memilih menggunakan sumber data dari Ethnologue karena sampai tulisan ini selesai ditulis, situs ini lebih cepat dan lebih detail dalam melakukan pembaharuan data mengenai bahasa. Ethnologue membuat semacam urutan status bahasa daerah yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 10 untuk menunjukkan status bahasa tersebut. Ethnologue juga menampilkan jumlah penutur yang angkanya didasarkan pada data yang diambil pada tahun yang berbeda. Data tersebut mengacu pada data yang pernah dikumpulkan oleh beberapa ahli bahasa dan juga sumber lain yang kompeten, termasuk data dari lembaga misionaris Kristen. Angka-angka tersebut kemungkinan besar tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini karena data diambil pada kurun waktu yang berbeda, dan jumlah penutur bahasa daerah bisa saja telah berubah karena berbagai faktor, salah satunya karena faktor kodrati yang tidak bisa dihindari, yakni meninggalnya si penutur bahasa. Berikut adalah urutan status bahasa yang diterapkan oleh Ethnologue: 0 = *International*, 1 = *National*, 2 = *Provincial*, 3 = *Wider Communication*, 4 = *Educational*, 5 = *Developing*, 6a = *Vigorous*, 6b = *Threatened*, 7 = *Shifting*, 8a = *Moribund*, 8b = *Nearly extinct*, 9 = *Dormant*, 10 = *Extinct* (lihat [www.ethnologue.com](http://www.ethnologue.com) untuk melihat penjabaran dari status bahasa yang lebih lengkap).

**Tabel 1.** Bahasa Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya

No.	Bahasa	Status	Jumlah Penutur
1	Aputai	8 b – <i>Nearly extinct</i>	150 (Hinton, 2000)
2	Babar Utara	6 b – <i>Threatened</i>	1000 (SIL, 2007)
3	Babar Tenggara	6 a – <i>Vigorous</i>	4460 (tanpa sumber, 2007)
4	Damar Timur	6 b – <i>Threatened</i>	2800 (SIL, 1990)
5	Damar Barat	6 b – <i>Threatened</i>	800 (tanpa sumber, 1987)
6	Dai	6 b – <i>Threatened</i>	820 (SIL, 2007)
7	Dawera – Dawelor	7 – <i>Shifting</i>	1270 (SIL, 2007)
8	Emplawas	8 b – <i>Nearly extinct</i>	250 (tanpa sumber, 2007)
9	Galolen	6 b – <i>Threatened</i>	680 (SIL, 1990)
10	Ili'uun	6 b – <i>Threatened</i>	1400 (SIL, 1990)
11	Imroing	7 – <i>Shifting</i>	560 (SIL, 2007)
12	Kisar	5 – <i>Developing</i>	20.000 (SIL, 1995)
13	Leti	7 – <i>Shifting</i>	7710 (Saupia, 2017)
14	Luang	5 – <i>Developing</i>	18.000 (SIL, 1995)
15	Masela Tengah	8 a – <i>Moribund</i>	510 (de Jonge, 1980)
16	Masela Timur	8 a – <i>Moribund</i>	520 (de Jonge, 1980)
17	Masela Barat	7 – <i>Shifting</i>	850 (SIL, 2007)
18	Oirata	7 – <i>Shifting</i>	1220 (SIL, 1987)
19	Perai	6 b – <i>Threatened</i>	280 (Hinton, 2000)
20	Serili	8 a – <i>Moribund</i>	330 (de Jonge, 1980)
21	Tela-Masbuar	6 a – <i>Vigorous</i>	1050 (SIL, 2007)
22	Tugun	6 a – <i>Vigorous</i>	1200 (SIL, 1990)

Sumber: *Ethnologue Edisi 23*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa status terbaik dari bahasa daerah yang ada di MBD berada pada status 5 (*developing*), yaitu pada bahasa Kisar dan Luang. Ethnologue menjelaskan bahwa status 5 berarti bahasa itu digunakan dengan kuat oleh beberapa orang, dengan literatur dalam bentuk standar, namun bahasa ini belum tersebar luas atau belum berkelanjutan. Bahasa Kisar dan Luang adalah dua bahasa daerah yang terbilang memiliki status yang relatif aman. Selanjutnya, ada dua bahasa yang berada pada status 6a (*vigorous*) yakni bahasa Babar Tenggara dan Tela-Masbuar, artinya bahasa ini digunakan untuk komunikasi tatap muka oleh semua generasi dan situasinya berkelanjutan. Di bawah status 6a, terdapat status 6b yang posisinya tidak lebih baik daripada status 6a. Ada tujuh bahasa yang berada pada status 6b (*threatened*), yang berarti bahwa bahasa ini digunakan untuk melakukan komunikasi tatap muka pada semua generasi, tetapi bahasa ini kehilangan penuturnya. Bahasa tersebut antara lain; Babar Utara, Damar Timur, Damar Barat, Dai, Galolen, Ili'uun, dan Perai. Bahasa Dawera–Dawelor, Imroing, Leti, Masela Barat, dan Oirata, adalah bahasa yang berada pada status 7 (*shifting*), yang berarti suatu generasi yang

melahirkan anak (generasi baru) dapat menggunakan bahasa itu di antara mereka sendiri, tetapi bahasa itu tidak diturunkan kepada anak-anak mereka. Bahasa Masela Tengah, Masela Timur, dan Serili, adalah bahasa yang berada pada status 8a (Moribund) yang berarti satu-satunya pengguna aktif yang tersisa dari bahasa ini adalah anggota generasi kakek-nenek dan yang lebih tua. Bahasa Aputai dan Emplawas berada pada status yang paling mengkhawatirkan, yaitu status 8b (*nearly extinct*) karena sangat dekat dengan kepunahan. Status 8b berarti satu-satunya pengguna bahasa yang tersisa adalah anggota generasi kakek-nenek atau lebih tua yang memiliki sedikit kesempatan untuk menggunakan bahasa tersebut ([www.ethnologue.com](http://www.ethnologue.com)).

Sebagai sumber rujukan lain, lihat Fishman (dalam Latupapua dan Maspaitella, 2015) yang membagi vitalitas bahasa menjadi: *Critically Endangered* (Sangat Kritis), *Severely Endangered* (Sangat Terancam), *Endangered* (Terancam), *Eroding* (Mengalami Kemunduran), *Stable but Threatened* (Stabil tetapi Perlu Dirawat), dan *Safe* (Aman). Lihat juga ahli bahasa yang lain yaitu Crystal (dalam Latupapua dan Maspaitella, 2015), yang menyusun klasifikasi 'kesehatan bahasa' menjadi beberapa klasifikasi, yakni; *Potentially endangered languages*, *Endangered languages*, *Seriously endangered languages*, *Moribund languages*, dan *Extinct languages*.

Status bahasa yang ditetapkan oleh Ethnologue memang berbeda dengan status bahasa yang ditetapkan oleh Fishman dan Crystal, namun demikian, artikel ini tidak akan membahas hingga ke ranah tersebut. Sejujurnya, tidak ada yang dapat memastikan apakah data dari Ethnologue (maupun data dari sumber lain) adalah data yang valid, namun setidaknya, data di atas dapat menjadi gambaran betapa kaya sekaligus rapuhnya bahasa daerah yang ada di MBD. Mundur ke tahun 1800-an, ada satu catatan lawas tentang bahasa daerah dalam manuskrip yang ditulis oleh Riedel pada sekitar tahun 1835-1911. Manuskrip itu berisi bahasa-bahasa daerah yang ada di Wetar. Informasi tentang bahasa daerah yang dikumpulkan oleh Riedel merupakan informasi yang didapatkan dari masyarakat Wetar yang kemudian ditulis dan disusunnya sendiri. Dalam manuskrip itu, Riedel membagi bahasa Wetar ke dalam lima kelompok. Belum diketahui apakah pengelompokan bahasa yang dilakukan Riedel telah ditindaklanjuti oleh ahli bahasa atau ahli sejarah di era yang lebih baru. Riedel tidak memberikan petunjuk tentang pemanfaatan atau penggunaan bahasa-bahasa yang disebutkan dalam manuskrip, apakah bahasa tersebut merupakan bahasa ritual atau bahasa suku yang dituturkan untuk guyub tutur dalam kehidupan sehari-hari. Manuskrip Riedel didominasi oleh bahasa Melayu Ambon yang khas dengan sedikit campuran bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan beberapa istilah dalam bahasa Wetar. Riedel berhasil memberi bukti bahwa bahasa Melayu Ambon memang bahasa yang dominan (Noegraha dalam Laporan Penelitian Jejak Antropologi, 2019).

**Tabel 2.** Bahasa Daerah Wetar Menurut Manuskrip Riedel

No.	Kelompok	Nama Bahasa
1.	Bahasa Ilwaki of Bahasa Kota	Derkuun
		Namaluli
		Huru
		Hauloor
		Hauraha
		Paserputih of Ireeli
		Ilwaki
		Ilikuat of Huhan
		Mabasak (nagri di gunung)
2.	Bahasa Tutonohon of Nusagari = Kepala Tanah	Mabuntubuti
		Manor
		Mahuan
		Lagauw
		Ekusi
		Matoo
		Hatumetan
		Ilipokil of Tutunohon
		Tuwilaiabat
		Aruwala
		Armauralan
		Sutiralan
		Hahora
		Nausan
		Pahuku
		Tudan
		Hatulai
		Eseu
Maka		
Uhak		
Parupu		
3.	Bahasa Leamara of Nusa Tuan = Belakang Tanah	Lihutahu
		Hatumanu
		Panua
		Luran
		Durawai
		Naumatan
		Erai
		Napar
Sulit		
Leamera		

4. Bahasa Hutahau of Nusaiun = Ekor Tanah: Klisanan	Inarmoun
	Kenralan
	Hatutan
	Woralan
	Kara
	Harapupu
	Gung
	Kilair
	Ilimetan
	Lemar
	Arnan
5. Bahasa Irelemur	Bahasa Iliwaki
	Bahasa Tutunohon
	Bahasa Leamera
	Bahasa Leamera
	Bahasa Hatutan
	Bahasa Irelemur

Sumber: Noegraha dalam Laporan Penelitian Jejak Antropologi 2019

Tidak hanya pada masa lalu, ternyata bahasa Melayu Ambon juga memiliki posisi yang penting di MBD pada masa kini. Hal itu terlihat dari dominannya bahasa tersebut dituturkan dalam berbagai kesempatan yang formal maupun informal, oleh penutur tua maupun muda. Meskipun demikian, bahasa Melayu Ambon bukanlah alasan tunggal yang dianggap dapat bertanggungjawab atas terpinggirkannya *bahasa tanah* di MBD. Faktanya, faktor internal yang terkait dengan latar belakang budaya penutur *bahasa tanah* itu sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap hidup-matinya bahasa ritual itu. Relatif sulit untuk menyelami lebih dalam tentang *bahasa tanah* di tengah durasi waktu penelitian yang sangat singkat. Terlebih ketika hampir semua narasumber yang merupakan penutur utama justru berkata, “Leluhur bisa marah kalau *beta* (saya) salah bicara.” Akibatnya, hampir tidak mungkin untuk mendengarkan tuturan *bahasa tanah* yang utuh dan magis ketika berada di luar ranah adat atau ranah ritual. Ucapan “Leluhur bisa marah kalau *beta* salah bicara,” hampir selalu tercetus ketika penulis berada di tengah-tengah tokoh yang dianggap sebagai *antua* (orang yang dihormati atau dituakan) yang ‘tahu adat’. Ungkapan ‘takut salah bicara’ dalam konteks ini sesungguhnya adalah bentuk kehati-hatian dalam bertutur dan juga sebagai wujud kepatuhan kepada *tete nene moyang* mereka.

*Bahasa tanah* dituturkan dalam berbagai peristiwa adat, misalnya pada adat perkawinan, adat kematian, *pela*, dan pemasangan *sasi*. Pada peristiwa adat tersebut, *bahasa tanah* merupakan bahasa pengantar dan media komunikasi yang menghubungkan antara manusia, leluhur, dan Tuhan, dengan dilengkapi syarat adat berupa *sopi* (minuman beralkohol tradisional hasil distilasi air sadapan pohon nira), kapur, sirih, dan pinang sebagai bentuk penghormatan. Sakralnya prosesi itulah yang mengharuskan tidak adanya kesalahan bertutur

dalam bentuk apapun. Walaupun menjadi bahasa pengantar, makna dan intisari dari tuturan *bahasa tanah* hanya dimengerti oleh sedikit orang, termasuk si penutur bahasa itu sendiri. Orang lain yang menyaksikan dan mendengarkan tokoh adat menuturkan bahasa tersebut biasanya menyimak tanpa benar-benar memahami makna dari bahasa yang dituturkan.

Dengan adanya ‘hukuman’ yang berat jika salah bertutur, maka kepatuhan untuk tidak menuturkannya pada sembarang waktu dan kesempatan adalah pilihan yang paling bijaksana. Sayangnya, kepatuhan tersebut bagaikan dua sisi mata uang atau paradoksikal. Di satu sisi, kepatuhan mereka dianggap sebagai bentuk upaya melindungi tradisi, tetapi di sisi lain, kepatuhan itu justru membuat tradisi yang mereka jaga semakin terancam hilang seiring dengan perubahan zaman. Dengan bersikap patuh, mereka tidak akan sembarangan mengumbar pengetahuan apapun (bukan hanya pengetahuan tentang bahasa) yang mereka miliki kepada pihak lain yang dianggap tidak berhak menerimanya. Jika ketentuan itu dilanggar atau mereka menuturkan bahasa yang salah ketika *duduk adat* atau ritual adat sedang berlangsung, *tete nene moyang* akan murka dan akan memberi hukuman yang beragam wujudnya. Hukuman itu dapat berupa nasib sial, mengalami sakit parah, hingga mengalami kematian yang tragis. Josafat Semolmoses Makeso (78 tahun) seorang tokoh adat nan bijak dari Suku Peray (Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Wetar), mengaku memahami sedikit makna dari *bahasa tanah* yang berasal dari sukunya, sayangnya dia tidak mampu menuturkan bahasa tersebut dengan baik. Josafat Semolmoses Makeso memberikan pendapat mengenai pentingnya untuk tidak salah dalam menuturkan *bahasa tanah*.

“Bahasa tua, itu sudah. Itu tidak bisa sembarang orang bisa ngomong. Itu orangnya sudah tahu tidak bisa omong. Sejarah bicara tanah saja, kalau kita salah bicara saja kita bisa mati. Ini kita juga kalau salah bicara kita mati, ya kita bicara sesuai apa yang kita tahu, dari pada yang pernah kita dengar, tapi kalau kita salah bicara ya bisa bahaya. Karena itu mungkin adalah adat, sakral.”

Cerita tentang kepatuhan pada tradisi dan pada leluhur memang mengundang decak kagum, namun bagaimana jika bahasa tersebut punah atau mati akibat dari kepatuhan tersebut? Terlebih ketika proses pewarisannya mandek dan terhenti di generasi penutur tua yang sesungguhnya sedang merasa risau, “Mungkin kalau *beta* mati, bahasa ini juga ikut terkubur *deng beta pung jasad*,” ucap salah satu dari mereka. Sesungguhnya, kepatuhan kepada tradisi dan leluhur bukanlah pemicu mengapa proses pewarisan *bahasa tanah* cenderung mandek karena pewarisan ke bawah atau vertikal masih mungkin dilakukan. Para penutur tua dari bahasa tua diperkenankan secara adat untuk mewariskan *bahasa tanah* yang mereka kuasai kepada keturunan langsung di bawah mereka, sepanjang mereka berdarah *marna*.

Lantas, mengapa pewarisan secara vertikal juga terkesan mandek? Menurut pandangan penulis, masa sekarang ini adalah masa yang tersulit karena proses pewarisan *bahasa tanah* justru dibenturkan kepada permasalahan; kemauan, motivasi, kebanggaan, rasa memiliki, dan rasa membutuhkan bahasa itu pada generasi yang lebih muda. Semua kembali

kepada generasi yang seharusnya mempelajari dan mewarisinya, apakah mereka bersedia mempelajari bahasa tersebut? Apakah mereka bangga memilikinya? Apakah generasi muda masih memandang ritual adat dan tuturan adatnya sebagai sesuatu yang harus dijalankan? Sekali lagi, Josafat Semolmoses Makeso (78 tahun) menuturkan pandangannya.

“Generasi sekarang sudah banyak yang meninggalkan bahasa tanah, hanya sedikit yang benar-benar memahami bahasa tanah karena tidak digunakan dalam keseharian. Karena terdesak, dengan begitu, zaman modern, maka hampir semua sudah tidak lagi diikuti.”

Potensi kepunahan bahasa selayaknya disikapi sebagai suara sinyal yang keras, bahwa sebanyak apapun bahasa daerah yang ada di Indonesia, semuanya layak menjadi prioritas untuk dijaga dan dilestarikan agar tidak ada lagi bahasa yang punah atau mati. Erniati (2018) mengemukakan tentang faktor utama yang bisa mengakibatkan kematian bahasa atau kepunahan bahasa, yakni meninggalnya semua penutur bahasa karena berbagai sebab, misalnya karena terjadinya bencana alam yang merenggut nyawa semua penutur bahasa atau penutur bahasa yang terakhir telah meninggal. Agar tidak terjadi kepunahan maka jalan yang harus diambil adalah melakukan revitalisasi bahasa, salah satunya dengan cara mendokumentasikan bahasa tersebut. Menurut Erniati, revitalisasi dengan cara dokumentasi adalah cara yang terbaik karena generasi yang lebih muda dapat melihat serta mempelajari hasil dokumentasi tersebut.

Dokumentasi bahasa menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Maluku untuk menyelamatkan bahasa daerah dari kepunahan. Salah satu bahasa yang berhasil didokumentasikan adalah bahasa Woirata. Dokumentasi tersebut berupa dokumen akademik atau naskah Tata Bahasa Woirata yang dalam jangka panjang direncanakan sebagai bahan ajar untuk pengembangan dan pengajaran bahasa Woirata (Asrif dalam Erniati, et, al. 2020). Selain itu, Kantor Bahasa Maluku juga yang telah berhasil menginisiasi semacam gerakan pelestarian bahasa lokal di Pulau Kisar, tepatnya di Desa Oirata Timur dan Desa Oirata Barat (<https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2020/02/punah-bahasa-punah-budaya-2/>).

Latupapua dan Maspaitella (2015) pernah mengkritisi peneliti-peneliti yang menitikberatkan kajian *bahasa tanah* hanya pada ranah yang terkesan teoritis, namun tidak memberikan masukan kritis agar dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak yang terkait. Dalam hal ini, penulis setuju dengan Latupapua dan Maspaitella. Agaknya, banyak yang tertarik dengan eksotisme *bahasa tanah* dalam ranah ritual dan adat namun terkesan abai memberi masukan positif, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan?

## PENUTUP

### A. Kesimpulan dan Saran

Tiga pulau di MBD yang penulis kunjungi memiliki riwayat, cerita, dan sejarah yang berbeda. Namun, antara satu sama lain memiliki kekayaan bahasa sekaligus kerentanan bahasa yang sama. Di ketiga pulau tersebut, penutur *bahasa tanah* semakin sedikit dan eksistensi bahasa itu sendiri semakin di ujung tanduk. Generasi muda yang sepatutnya mempelajari *bahasa tanah* terhalang oleh tradisi serta aturan adat ketat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan seiring dengan perkembangan zaman, mereka cenderung terbelenggu oleh sikap gengsi untuk berbahasa daerah karena mereka lebih akrab dengan bahasa Melayu Ambon sebagai *lingua franca* yang menjembatani perbedaan bahasa di antara mereka.

Menilik pada kerja keras Kantor Bahasa Maluku yang telah berhasil mendokumentasikan bahasa Woirata, tampaknya upaya yang sama bisa dilakukan juga pada *bahasa tanah* di MBD. Pendokumentasian bahasa Woirata merupakan contoh baik dan menjadi bukti bahwa upaya penyelamatan bahasa daerah harus segera dilakukan. Dari contoh baik tersebut, tidaklah mustahil untuk melakukan upaya dokumentasi *bahasa tanah*, namun dengan catatan penting, yakni dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan budaya kepada para maestro atau penuturnya. Para penutur harus terlebih dahulu memahami kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi jika proses dokumentasi tidak dilakukan, salah satunya adalah kemungkinan tentang matinya bahasa tersebut di kemudian hari dan apa konsekuensinya bagi keberlangsungan tradisi serta jati diri mereka.

Untuk itu, penulis merasa perlu untuk memberikan saran agar *bahasa tanah* bisa memiliki status yang lebih baik di masa depan. Hal yang pertama, perlu dilakukan kajian *bahasa tanah* dengan melibatkan lintas keilmuan yang relevan dan menitikberatkan kajian pada nilai budaya dari si penutur bahasa. Kedua, berupaya menanamkan gerakan cinta bahasa daerah dengan lebih masif dengan melibatkan generasi muda, bukan hanya di lembaga formal namun juga di lembaga informal, salah satunya di level lembaga adat (misalnya di dalam *saniri*). Tentu saja, hal ini harus dilakukan dengan regulasi yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrif, (2019). “Bahasa Tanah.” Kantor Bahasa Maluku. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 28 Februari . <https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2019/02/bahasa-tanah/>.
- Asrif, (2020). “PUNAH BAHASA, PUNAH BUDAYA.” Kantor Bahasa Maluku. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 10 Februari. <https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2020/02/punah-bahasa-punah-budaya-2/>.



- Asrif, (2019). “Menyajakan Bahasa Daerah.” Kantor Bahasa Maluku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12 Desember. <https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2019/12/menjayakan-bahasa-daerah/>.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., IV (Ed.), (2019). Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. Diakses 27 Agustus 2020, [https://petabahasa.kemdikbud.go.id/infografisdir/783Leftlet\\_Peta\\_Bahasa\\_2019.pdf](https://petabahasa.kemdikbud.go.id/infografisdir/783Leftlet_Peta_Bahasa_2019.pdf)
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ed, (@2019). “Sekapur Sirih Bahasa Dan Peta Bahasa Di Indonesia”. <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/sekapursirih.php>.
- Badan Pusat Statistik, (2018). *Maluku Barat Daya dalam Angka*. BPS Maluku Barat Daya.
- Collins, James T, (2019). “Global Eras and Language Diversity in Indonesia: Transdisciplinary Projects Towards Language Maintenance and Revitalization.” *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 9, No. 2: 103–17.
- Eberhard, David M, Gary F Simons, and Charles D Fennig, (2020). “Languages of the World. Twenty-Third Edition.” *Ethnologue*. Dallas, Texas: SIL International, 2020.
- Erniati. (2018). “Kepunahan dan Revitalisasi Bahasa Daerah.” Kantor Bahasa Maluku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 12 Juli. <https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2018/07/kepunahan-dan-revitalisasi-bahasa-daerah/>.
- Erniati, Nita Handayani Hasan, dan Adi Syaiiful Mukhtar, (2020). *Tata Bahasa Woirata*. Makassar, Indonesia: Penerbit Garis Khatulistiwa.
- Laporan Penelitian Jejak-Jejak Antropologi di Maluku Barat Daya, (2019). Tidak diterbitkan. Badan Litbang Maluku Barat Daya.
- Latupapua, Falantino Eryk, dan Martha Maspaitella, (2015). “Kebocoran Diglosia dan Pertahanan Bahasa Tanah sebagai Bahasa Adat di Kabupaten Maluku Tengah.” *Seminar Nasional Bahasa Ibu VII, “Pemberdayaan Bahasa-Bahasa Lokal sebagai Bahasa Ibu dalam Rangka Pembentukan Karakter Bangsa yang Majemuk”*, 304–350. Bali, Indonesia: Program Magister dan Doktor Linguistik Pascasarjana Universitas Udayana.
- Latupapua, Falantino Eryk, (2017). “SEJARAH SASTRA LOKAL MALUKU: SEBUAH STUDI AWAL [The History of Maluku’s Local Literature: An Initial Study].” *Totobuang* 5, No. 1 (30 Juni): 107–119.

